BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lingkungan Ekonomi

Perubahan lingkungan ekonomi akan mempengaruhi secara cepat terhadap pelaku bisnis/perubahan bisnis, perubahan tersebut secara cepat akan di mediasikan oleh adanya perubahan teknologi, pengenalan produk, perubahan pola konsumen dan kebijakan pemerintah.

Arus globalisasi juga telah menciptakan saling ketergantungan antar bangsa, pelaku bisnis dalam maupun luar negeri, sehingga saat ini dapat dikatakan tidak ada satu negarapun yang tidak bergantung kepada negara lain. Aspek keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif serta perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi sangat berperan dalam transaksi perdagangan.

2.2. Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Disebutkan bahwa disamping bank umum, ada juga lembaga keuangan bukan bank.

Perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut adalah pada kemampuan mereka menciptakan kredit dan mengedarkan

uang. Pada umumnya bank mempunyai kemampuan menciptakan kredit atau mengedarkan uang dan menambah jumlah uang yang beredar, sedangkan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lebih kepada penyediaan modal. Namun keduanya memiliki persamaan, yaitu memperlancar pertukaran barang dan jasa dengan menggerakkan uang, dan membantu menyalurkan dana dari penabung ke investor atau peminjam yang membutuhkan dana.

Secara definitif, pengertian Bank menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Selanjutnya, di dalam pasal tersebut disebutkan, Bentuk simpanan bank terdiri dari giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk rekening yang disamakan dengan itu. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Deposito adalah simpanan yang penarikannya tidak setiap saat tetapi pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian perjanjian dengan bank. Sertifikat deposito merupakan simpanan bentuk deposito yang sertifikatnya dapat dipindahtangankan. Tabungan merupakan simpanan yang

penarikannya hanya pada waktu tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sementara itu, pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan adanya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang usahanya secara komersial atau berdasarkan prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Ditinjau dari kepemilikannya, Pasal 21 Undang-undang Nomor.10 tahun 1998 menyebutkan, bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa Perseroan terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah. Sedangkan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat, masih mengacu pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas, maupun bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dibandingkan dengan konsep bank menurut Undang-undang Nomor 14/1967, konsep kepemilikan bank menurut Undang-undang Nomor 7/1992 ataupun Undang-undang Nomor 10/1998, relatif lebih sederhana.

Pada Undang-undang Nomor 14/1967, dikenal adanya bank pemerintah, bank swasta, bank asing, bank koperasi dan bank-bank lainnya. Ditinjau dari fungsinya, pasal 3 Undang-undang Nomor 7/1992 disebutkan bahwa fungsi utama perbankan di Indonesia pada dasarnya serupa dengan fungsi lembaga keuangan pada umumnya, yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat.

Disamping itu, pasal 4 Undang-undang Nomor 7/1992 menyetujui bahwa perbankan di Indonesia mempunyai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2.3. Usaha Bank

Usaha-usaha bank adalah usaha-usaha yang bergerak dalam industri jasa keuangan. Secara rinci Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan adanya 14 klasifikasi usaha Bank Umum. Sementara pada Pasal 13 Undang-undang tersebut menyebutkan adanya 4 klasifikasi usaha Bank Perkreditan Rakyat. Kesamaan fungsi keduanya, diantaranya dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Perbedaan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, pada Bank Umum, dana yang dihimpun bisa dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang

dipersamakan dengan itu, sedangkan pada Bank Perkreditan Rakyat, bentuk giro atau simpanan lain yang dapat ditarik dengan cek, tidak dapat dilakukan.

Selain usaha penyimpanan dana masyarakat, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank umum dapat melakukan usaha-usaha seperti pemberian kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, memindahkan uang, menempatkan dana dan meminjamkan dana kepada bank lain, meminjam dana dari bank lain, melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat, dan lain-lain kegiatan yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, adalah melakukan penyertaan modal kecuali pada perusahaan di bidang keuangan atau mengatasi kegagalan kredit, dan tidak boleh melakukan usaha perasuransian.

Pada Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Undang-undang tersebut, dapat memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah, dan menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan Tabungan pada Bank lain. Bank Perkreditan Rakyat tidak diperbolehkan adalah menerima simpanan giro, ikut dalam lalu lintas

pembayaran, usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dan usaha asuransi.

2.4. Beberapa Macam Pendapatan Bank

2.4.1. Bunga Bank

Keberadaan bank tidak terlepas dari berkembangnya masyarakat kapitalis di negara-negara barat. Artinya sebelum masyarakat kapitalis di negara-negara barat berkembang, bank belumlah berkembang. Salah satu karakteristik masyarakat kapitalis adalah sudah berkuasanya kapital dan dikendalikannya bunga. Pengertian bunga sendiri adalah harga dari suatu kapital (Lerner dan Zima, 1985).

Tahun 1776, Adam Smith dalam bukunya "The Wealth of Nations" menganggap bunga sebagai ganti rugi yang dibayarkan si peminjam kepada yang meminjamkan (Manan, 1992). Kemudian para ahli ekonomi Austria seperti Bohm-Bawerk menjelaskan mengapa bunga dibayarkan. Menurutnya, bunga timbul karena orang lebih menyukai barang dimasa yang akan datang, dan karena kepuasan dimasa lalu, kalau menilai dengan pendirian waktu sekarang, mengalami diskonto, maka bunga adalah diskonto harga (Manan, 1992).

Lebih lanjut, Boediono (1998) mendefinisikan tingkat bunga, yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga

merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit. Seandainya Bank A meminjamkan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada B dengan bunga 13,5% setahun, maka setahun lagi B harus mengembalikan sebesar Rp.1.135.000,- yang merupakan bunga kepada Bank A sebagai kreditur.

Pengertian tingkat bunga sebagai harga dapat juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti, misalnya satu tahun lagi. Hutang piutang timbul karena terjadi pertukaran semacam ini. Pembeli dari satu rupiah sekarang dan sekaligus penjual dari satu rupiah nanti adalah peminjam (debitur). Sedangkan penjual dari satu rupiah sekarang yang sekaligus juga pembeli dari satu rupiah nanti adalah orang yang meminjamkan (kreditur). Debitur harus membayar kepada kreditur harga dari pertukaran tersebut dan harga ini adalah bunga yang dibayar debitur (Boediono, 1998).

Bunga didalam sistem perbankan syariah tidak dikenal karena adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi Islam riba dilarang sedangkan jual beli dihalalkan, sehingga perbankan Islam didalam usahanya menghimpun dari para deposan berdasarkan *mudharabah* dan menginvestasikan uang tersebut didalam berbagai proyek bisnis perdagangan menurut tehnik-tehnik berdasarkan sistem *profit and loss sharing* (Algaud dan Lewis, 2001).

2.4.2. Komisi dan Provisi

Komisi dan provisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada para nasabahnya yang mempergunakan jasa bank yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan. Jasa bank yang dimaksud adalah jasa-jasa yang dipergunakan dalam operasional bank sebagai fungsi memperlancar pembayaran transaksi perdagangan dan fungsi mempercepat peredaran uang (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Pada fungsi memperlancar perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri.

2.4.2.1. Perdagangan Dalam Negeri

Pada perdagangan dalam negeri setiap terjadi transaksi perdagangan selalu diikuti pula dengan penyerahan barang dan pembayaran. Keterlibatan bank dalam pembayaran transaksi perdagangan dalam negeri ini dapat dijelaskan dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

a. Pembayaran Dengan Transfer

Apabila A melakukan transaksi perdagangan dengan Z yang letaknya berlainan kota maka pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan jasa bank B berupa transfer uang. Atas jasa transfer uang tersebut bank B akan meminta imbalan jasa berupa provisi transfer yang besarnya telah ditentukan sesuai tarif bank tersebut (Dresdner Bank AG., 1996).

b. Pembayaran Dengan Instrumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri

Penegertian Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau lazim dikenal dengan “Letter of Credit” (L/C) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon yang mengikat Bank Pembuka untuk melakukan pembayaran, mengaksep dan membayar atau menguasai kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima, atas penyerahan seperangkat dokumen sepanjang syarat SKBDN dipenuhi (Peraturan Bank Indonesia, 2003). Untuk transaksi pembayaran dengan menggunakan instrumen SKBDN, bank pemberi jasa SKBDN dapat dibedakan menjadi :

- bank penerbit,
 - bank penerima/pengadvis, dan
 - bank pembayaran atau bank penegosiasi
- yang kesemuanya akan mengenakan biaya (*fee*).

Sebagai pemberi jasa penerbit SKBDN, bank dapat mengenakan biaya-biaya antara lain sebagai berikut :

- provisi pembukaan SKBDN (dan perubahan jika ada)
- komisi akseptasi
- komisi pembayaran (*reimbursement fee*)
- *discrepancy fee*

- provisi inkaso (jika dokumen ditagihkan secara inkaso)
- pembatalan SKBDN (jika terjadi pembatalan)

sedangkan bank yang berfungsi sebagai penerima SKBDN akan mengenakan biaya *advis* (*advising commission*), bank yang berfungsi memindahkan (mentransfer) SKBDN akan mengenakan *transferring fee*, bank yang mengambil alih dokumen (negosiasi) SKBDN akan mengenakan provisi negosiasi, yang besarnya telah ditentukan dengan tarif tertentu.

2.4.2.2. Perdagangan Luar Negeri

Pada transaksi perdagangan luar negeri, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan perdagangan internasional bersifat tidak pasti (Hutabarat, 1996). Adapun kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- perbedaan letak geografis,
- perbebaan sistem hukum dan politik,
- perbedaan mata uang (*currency*),
- perbedaan bahasa,
- adanya resiko suatu negara (*country risk*), dan
- benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara penjual dan pembeli

Dengan adanya kendala-kendala tersebut diatas, peranan bank untuk menjembatani transaksi perdagangan luar negeri menjadi sangat diperlukan (Murtagh, 1997). Adapun cara pembayaran transaksi perdagangan luar negeri (ekspor-impor) adalah sebagai berikut (Peraturan Pemerintah, 1982) :

- a. *Advance Payment*, adalah pembayaran dimuka oleh importir kepada eksportir atas barang yang di pesan. Dengan kata lain importir memberikan kredit modal kerja tanpa bunga kepada eksportir. Pembayaran dapat dilakukan secara sebagian atau seluruhnya atas nilai barang sebelum dikirim oleh eksportir.
- b. *Open account* adalah cara pembayaran barang dimana eksportir memperbolehkan importir membayar barang yang mereka beli yang pembayarannya dilakukan beberapa waktu setelah penerimaan barang, misalnya dua atau tiga bulan kemudian. Sistem pembayaran ini adalah kebalikan dari sistem "*Advance Payment*". Dalam hal ini yang menanggung resiko adalah eksportir, sedangkan yang mendapat fasilitas kredit penanguhan bayaran adalah importir (Brundage dan A. Schultz, 1986).

Dalam cara pembayaran ini eksportir mengirimkan barang dan seluruh dokumen pengapalan barang termasuk *bill of lading* langsung kepada importir. Dengan demikian pada saat barang tiba di pelabuhan atau lapangan udara, importir dapat mengambilnya untuk kemudian diproses

di perusahaannya atau langsung dijual ke pasar. Dengan perkataan lain eksportir memberikan kredit penjualan kepada importir.

Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disepakati dengan cara pemindahbukuan/transfer dari rekening *buyer* ke rekening eksportir yang bersangkutan, atau dengan mengirimkan *bank draft/cheque, telegraphic transfer (TT)*, atau *mail payment order*, pada saat tanggal jatuh tempo tagihan.

- c. *Collection* (inkaso), yaitu pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir setelah pembeli menerima tagihan berupa dokumen-dokumen yang dikirim oleh penjual melalui jasa bank. Sistem pembayaran ini lebih besar kekuatannya dari “*Open Account*”, sebab eksportir (penjual) mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai *draft/weselnya* diaksep atau dibayar (Brundage dan A. Schultz, 1986). Eksportir atau sipenarik wesel (*drawer*) mengapalkan barang-barang ekspornya yang ditujukan kepada importir dan sementara itu dokumen-dokumen pemilikan/ penguasaan atas pengiriman barang-barang tersebut secara langsung atau melalui banknya di dalam negeri dikirim ke bank importir di luar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan (*drawee*).

Pemilikan atas dokumen-dokumen yang diperlukan oleh importir untuk mengeluarkan barang-barang tersebut tidak dilepaskan sampai persyaratan-persyaratan penagihan wesel tersebut telah dipenuhi.

Dokumen–dokumen tersebut dapat diserahkan kepada importir atas dasar :

- *Documents against payment (D/P)* = Penyerahan dokumen kepada importir dilakukan apabila importir telah membayar.
- *Documents against Acceptance (D/A)* = Penyerahan dokumen kepada importir apabila importir telah mengaksep wesel yang bersangkutan.

- d. *Consignment* (konsinyasi), adalah pengiriman barang-barang ekspor pada importir diluar negeri dimana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir. Barang-barang tersebut dikumpulkan dan dijual oleh importir yang merupakan agen dari eksportir tersebut dan segera setelah barang-barang tersebut laku terjual maka pembayarannya akan dilakukan kepada eksportir (Andhibroto, 1987). Bilamana barang-barang tersebut tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada eksportir.
- e. *Letter of Credit (L/C)*, adalah instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh bank atas permintaan *applicant* (importir) untuk melakukan pembayaran, mengaksep dan membayar, atau menegosiasi atas seperangkat dokumen yang diserahkan oleh eksportir sepanjang dokumen-dokumen dimaksud memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan. Sistem ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barangnya dari importir asalkan

eksportir tersebut dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai yang disyaratkan dalam L/C (UCPDC No.500, 1993).

Dengan penerbitan L/C ini sebuah bank (*issuing bank*) bertindak sebagai pengganti importir yakni pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang terdapat dalam L/C.

Jadi L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank* tersebut atas nama dan untuk kepentingan importir yang ditujukan pada eksportir adalah merupakan fasilitas bank bagi importir yang bersangkutan, sebab bilamana importir yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran, maka *issuing bank* akan menanggung resiko untuk mengambil alih kewajiban-kewajiban importir tersebut untuk melakukan pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara penerbitan L/C oleh bank atas permintaan importir.

- f. Pembayaran lain sesuai kesepakatan antara importir dan eksportir yang antara lain dapat dilakukan dengan cara *Counter Trade*, *Classical Barter* ataupun dengan *Counter Purchase*.

Sedangkan menurut istrumennya, cara pembayaran tersebut diatas dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu pembayaran dengan L/C dan pembayaran tanpa L/C (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Untuk pembayaran tanpa L/C, bank didalam menjalankan fungsinya lebih kepada melaksanakan pemindahan dana dan/atau menerima dan mengirim dokumen

ekspor-impor sehingga profit yang akan diterima terbatas pada provisi transfer dan biaya pengiriman dokumen. Sedangkan untuk pembayaran dengan menggunakan instrumen L/C bank dapat memperoleh *fee based* sebagai berikut :

a. Transaksi Impor dengan L/C

Untuk transaksi impor bank akan menjalankan fungsinya sebagai penerbit L/C dan untuk itu *issuing bank* akan mengenakan provisi (*banking commission*) pembukaan L/C impor, dan jika importir menghendaki perubahan atas L/C yang telah diterbitkan, *issuing bank* akan mengenakan provisi perubahan L/C impor (Ellinger, 1970). Jika L/C yang diterbitkan adalah *acceptance L/C (usance L/C)* maka pada saat dokumen diterima dari banknya eksportir, *issuing bank* harus melakukan akseptasi dan untuk itu *accepting bank* akan mengenakan komisi akseptasi kepada importir. Sedangkan jika dokumen ditagihkan secara *collection* karena adanya dokumen yang tidak sesuai (*discrepancy*) dengan syarat L/C, *presenting bank* akan mengenakan *payment fee*.

b. Transaksi Ekspor dengan L/C

Dalam transaksi ekspor bank akan menjalankan fungsinya menerima dan meneruskan L/C kepada eksportir dan untuk itu bank akan mengenakan komisi penerusan L/C (*advising commission*). Serupa dengan transaksi impor maka jika terjadi perubahan L/C yang telah diterbitkan, bank akan

mengenakan komisi penerusan perubahan L/C. Jika L/C yang diterima oleh eksportir adalah *payment L/C*, *paying bank* akan mengenakan *payment commission* kepada eksportir, jika L/C yang diterima eksportir adalah *negotiation L/C*, *negotiating bank* akan mengenakan provisi negosiasi dan jika *usance L/C* maka banknya eksportir dapat mengenakan *discount charges* jika dokumen didiskontokan atau *payment fee* jika dokumen dibayar pada saat jatuh tempo dibayar (Brundage dan A. Schultz, 1986). Sedangkan jika dokumen ditagihkan secara *collection* karena adanya dokumen yang tidak sesuai dengan syarat L/C, *collecting bank* akan mengenakan provisi *collection*.

2.4.2.3. Transaksi Jasa-jasa Lainnya

Beberapa transaksi jasa perbankan lainnya yang merupakan sumber pendapatan *fee based* antara lain sebagai berikut :

a. Fund Transfer

Adalah pengiriman uang yang perintah pembayaran/*payment order* dilaksanakan antara bank, baik dari/ke non koresponden atau koresponden bank (Brundage dan A. Schultz, 1986). Sarana yang digunakan bisa dengan surat, telex atau SWIFT dengan pengamanan-pengamanan tertentu (Dresdner Bank AG, 1996). Transfer dibedakan menjadi dua, yaitu transfer keluar dan transfer masuk.

b. Documentary Collection

Merupakan jasa penagihan pembayaran yang dilakukan bank kepada pihak tertarik atas dasar suatu dokumen, *financial document* dan/atau *commercial document* (Brundage dan A. Schultz, 1986).

c. Bank Garansi

Adalah suatu Jaminan tertulis dari pihak Bank kepada pihak Penerima Jaminan yang menyatakan bahwa Bank akan membayar sebesar jumlah yang tertulis dalam Bank Garansi apabila yang dijamin gagal dalam melaksanakan kewajibannya (Dresdner Bank AG, 1996).

Berbagai jenis dan macam Bank Garansi yang dapat diterbitkan oleh bank, baik atas dasar fasilitas bank itu sendiri maupun atas dasar *counter guarantee* dari bank lain sebagai berikut :

- Bank Garansi untuk Tender (*Bid Bond*), Bank Garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor/leveransir yang mengikuti tender di dalam maupun luar negeri.
- Bank Garansi untuk Penerimaan Uang Muka Kerja (*Advance Payment Bond*), Bank Garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor/leveransir untuk menjamin penerimaan pembayaran uang muka proyek yang diterima kontraktor dari bouwheer.

- Bank Garansi untuk Pelaksanaan Pekerjaan (Performance Bond), Bank Garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor/leveransir guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bouwheer.
- Bank Garansi untuk Pemeliharaan (Retention Bond), Bank Garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor dalam rangka jaminan pemeliharaan terhadap proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor.
- Bank Garansi kepada Maskapai Pelayaran (*Shipping Guarantee*), Bank Garansi yang diberikan kepada Maskapai Pelayaran untuk kepentingan importir dalam rangka pengeluaran barang-barang dengan copy (Non Negotiable) *Bill of Lading*, karena asli *Bill of Lading* belum diterima.
- Bank Garansi untuk Pita Cukai Tembakau, Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai untuk kepentingan yang dijamin (Perusahaan/pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran.
- Bank Garansi untuk Perdagangan, Bank Garansi yang diberikan kepada pabrik dan *stock holder* (misalnya Pertamina, BULOG, Unilever, Nestle) untuk kepentingan agen/*dealer*/penyalur sebagai

jaminan pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada agen/*dealer*/penyalur tersebut.

- Bank Garansi untuk Penangguhan Bea Masuk, Bank Garansi yang diberikan kepada Kantor Bea Cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan.
- Bank Garansi untuk Pembelian Aktiva Tetap, Bank Garansi yang diberikan kepada *supplier* untuk kepentingan *dealer* atau *end user* guna menjamin pembayaran/angsuran pembelian aktiva tetap (*fixed asset*).
- Bank Garansi kepada Departemen Pertambangan dan Energi, Bank Garansi yang diberikan kepada Departemen Pertambangan dan Energi untuk kepentingan Pemohon Kuasa Pertambangan dalam rangka penyelidikan, eksplorasi dan pelaksanaan pertambangan.
- Bank Garansi untuk Menjamin Pemberi Kredit, Bank Garansi yang diberikan kepada kreditur untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman/ kredit yang diterima oleh pihak lain.
- Bank Garansi untuk Pembelian/Pengadaan Bahan Baku, Bank Garansi yang diberikan kepada *supplier* bahan baku untuk menjamin

pembayaran dalam rangka pembelian/pengadaan bahan baku yang dikeluarkan oleh nasabah.

d. Valuta Asing

Merupakan jasa yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk penukaran valuta asing dengan valuta dalam negeri atau antar satu valuta asing dengan valuta asing lainnya dengan cara jual beli (*foreign exchange*), umumnya pelaku transaksi ini adalah importir untuk keperluan pembelian bahan baku dan eksportir yang menerima hasil ekspornya dalam mata uang asing (Brundage dan A. Schultz, 1986). Dalam transaksi ini bank akan memperoleh *margin* antara harga jual dengan harga beli dari *currency* yang dipertukarkan. Terdapat beberapa jenis transaksi valuta asing antara lain *cash exchange* berupa jual atau beli uang kertas asing (*bank notes*) dan jual atau beli valuta asing secara TODAY, TOMORROW, SPOT, FORWARD dan SWAP (Kuncoro dan Suharjono, 2002).

e. Payment Point

Adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk penerimaan pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk pihak tertentu, biasanya giro milik suatu perusahaan (Lapoliwa dan Kuswandi, 1988). Dalam transaksi ini, bank akan membebankan biaya kepada

institusi penerima pembayaran yang besarnya telah ditentukan pada saat penanda tangan perjanjian kerjasama.

f. Payroll Package

Adalah jasa ditawarkan oleh bank kepada institusi atau lembaga tertentu yang telah memiliki rekening, biasanya giro perusahaan, untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawainya baik dengan sistem tunai atau dengan sistem pindah buku dari rekening perusahaan dimaksud kepada rekening para pegawai perusahaan tersebut.

g. Custodian

Adalah pihak yang menerima jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain (penyimpanan secara fisik) termasuk menerima deviden atau bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan jasa transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya (Undang-Undang Pasar Modal, 1995).

h. Cash Management

Merupakan jasa pelayanan melalui *Cash Managemen System* yang diberikan oleh bank kepada para nasabah pemegang rekening, umumnya giro untuk melakukan akses rekening yang tersebar, melakukan transaksi pembayaran atau pemindahan dana secara elektronik,

mengoptimalkan pengendapan dana dan melakukan rekonsiliasi secara efektif dan efisien.

i. Safe Box Deposit

Salah satu jasa bank yang sampai dengan saat ini masih terus dipromosikan adalah jasa dalam bentuk penyediaan tempat penyimpanan benda atau surat berharga milik nasabah. Tempat tersebut berupa kotak-kotak ruang yang disewakan dengan tarip tertentu menurut volumenya, dimana bank menjamin kerahasiannya. Pengambilan dan penyimpanan barang atau surat berharga hanya dapat dilakukan bila pihak penyewa dan bank hadir (Lapoliwa dan Kuswandi, 1988).

Masih banyak lagi produk jasa lainnya seperti *Credit Card*, *Debit Card*, *Travellers Chek*, *Bank Reference*, *E-Banking* berupa SMS banking dan Internet Banking namun untuk daerah tertentu peminatnya relatif masih sangat sedikit.